

Siaran Pers

Setahun Carut Marut Data Kematian, Kewaspadaan terhadap COVID-19 Memudar

JAKARTA - Setahun sejak kasus pertama COVID-19 di Indonesia diumumkan, pencatatan korban jiwa masih juga bermasalah. Data kasus kematian akibat COVID-19 dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota berbeda. Jumlah kematian yang dilaporkan juga lebih kecil dibandingkan angka riil. Hal ini bisa menurunkan tingkat kewaspadaan publik dalam melawan virus tak kasat mata tersebut.

Pencatatan data kematian di Indonesia masih belum mengikuti pedoman WHO (Organisasi Kesehatan Dunia). Sejak April 2020, WHO menghitung jumlah korban yang meninggal dengan status terduga COVID-19, suspek, dan probable, selain yang terkonfirmasi positif dari tes PCR. Namun, pemerintah hanya menetapkan kasus kematian COVID-19 jika korban terkonfirmasi positif berdasarkan tes PCR. Padahal, banyak kasus kematian terduga COVID-19 yang belum sempat menjalani tes PCR.

“Selain tidak mengikuti pedoman WHO, data kematian dengan status positif COVID-19 yang diumumkan pemerintah pusat juga lebih kecil dibandingkan laporan kabupaten/kota,” kata Said Fariz Hibban dari Tim LaporCovid-19.

Data yang dikumpulkan relawan LaporCovid19 dari 514 kabupaten/kota hingga 25 Februari 2021 menunjukkan, jumlah korban jiwa dengan status positif di Indonesia mencapai 41.682 jiwa. Sebanyak 171 kota/kabupaten di antaranya belum memperbaharui datanya.

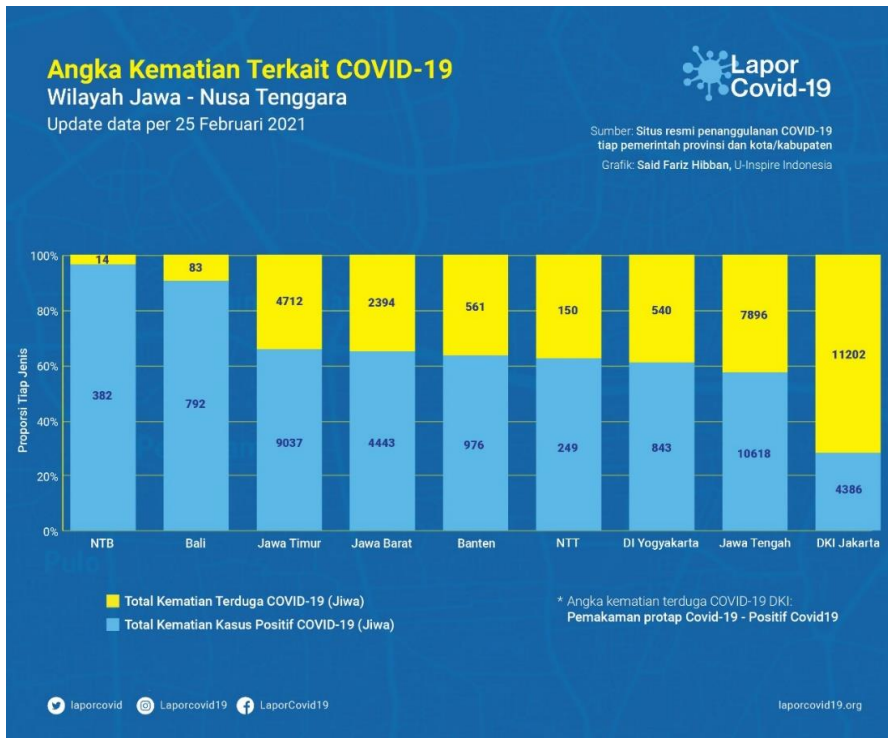
Jumlah korban jiwa dari daerah berbeda dengan yang diumumkan pemerintah pusat melalui Satgas COVID-19. Hingga 25 Februari 2021, kasus kematian tercatat sebanyak 5.518 jiwa. Ini berarti terdapat sekitar 6.000 data kematian dari kabupaten/kota yang belum dikonfirmasi dan diumumkan pemerintah pusat.

Jumlah korban jiwa di Indonesia bisa lebih besar lagi jika memasukkan korban yang meninggal dengan status terduga COVID-19, yang mencapai 71.872 jiwa. Ini berarti terdapat 30.244 korban jiwa (42,1 %) yang belum diumumkan Satgas COVID-19. Data bisa dilihat dalam grafik di bawah ini.

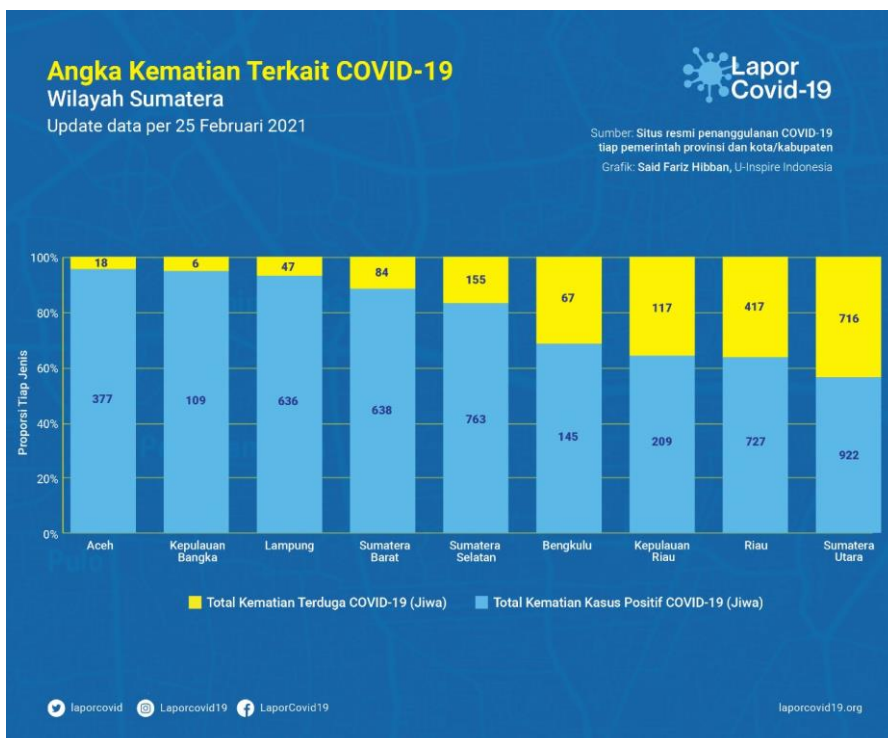


Jawa Tengah Tertinggi

Berdasarkan data kematian nasional, Jawa Tengah tercatat memiliki kasus kematian tertinggi. Secara akumulatif, korban jiwa di Jateng yang dicatat LaporanCovid-19 mencapai 18.514 jiwa. Berikutnya, DKI Jakarta sebanyak 15.588 jiwa, diikuti Jawa Timur 13.749 jiwa, Jawa barat 6.837 jiwa, dan Sumatera Utara 1616 jiwa. Grafik dari tiga wilayah Indonesia tersebut menggambarkan perbandingan kematian positif (biru) dan kematian terduga (kuning).



Proporsi Angka Kematian terkait COVID-19 wilayah Jawa – Nusa Tenggara



Proporsi Angka Kematian terkait COVID-19 wilayah Sumatera

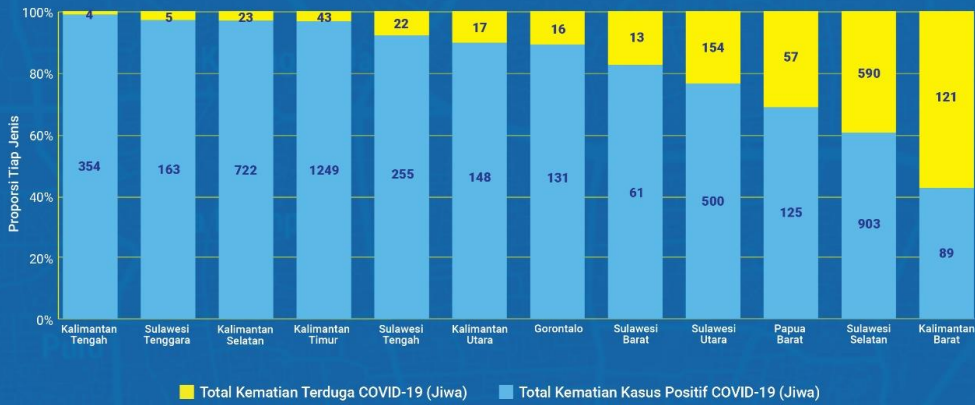
Angka Kematian Terkait COVID-19

Wilayah Kalimantan - Sulawesi - Papua

Update data per 25 Februari 2021



Sumber: Situs resmi penanggulangan COVID-19 tiap pemerintah provinsi dan kota/kabupaten
 Grafik: Said Fariz Hibban, U-Inspire Indonesia



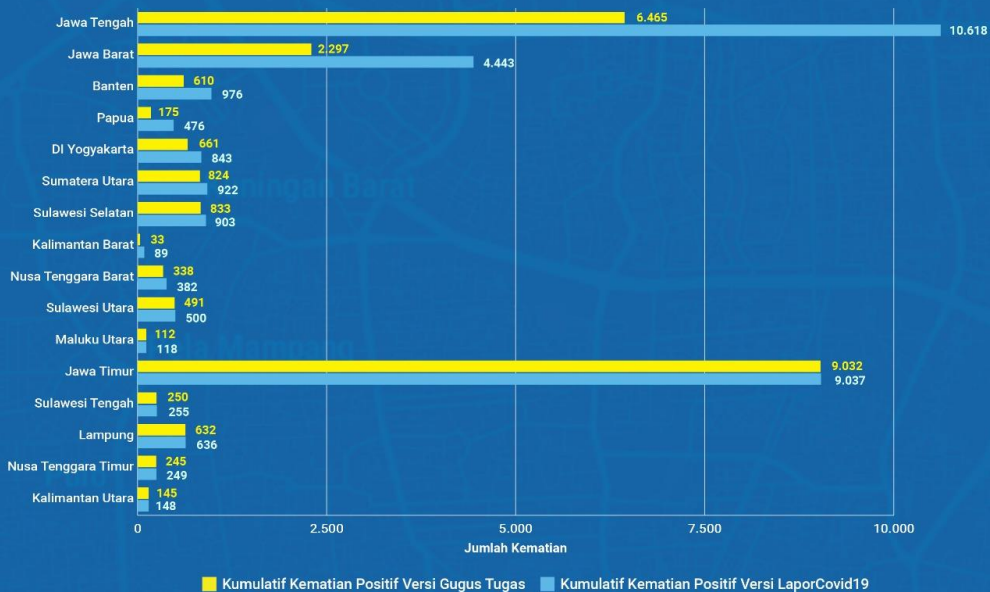
Proporsi Angka Kematian terkait COVID-19 wilayah Kalimantan – Sulawesi – Papua

laporcovid Laporcovid19 LaporCovid19

laporcovid19.org

Kesenjangan Data Kematian Positif COVID-19 versi Kemenkes RI dengan Kabupaten/Kota

Perbandingan Jumlah Kematian Positif tiap Provinsi versi Kemenkes RI dan versi LaporCovid-19



laporcovid Laporcovid19 LaporCovid19

laporcovid19.org

Tim LaporanCovid-19 juga menemukan gap angka kematian dari kabupaten/kota dengan pemerintah pusat. Ketimpangan data itu tampak pada grafik di atas dengan bar kuning adalah angka versi Kemenkes RI dan bar biru merupakan angka versi pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan grafik tersebut terlihat 5 provinsi dengan gap angka kematian positif COVID-19 terbesar. Daerah itu adalah Jawa Tengah sebesar 4.153, Jawa Barat (2.146), Banten (366), Papua (301), dan DI Yogyakarta (182).

Menurut Hibban, perbedaan ini menunjukkan, belum ada perbaikan dalam tata kelola data meski pandemi sudah melanda setahun. Padahal, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, di berbagai media, pernah berjanji membenahi data COVID-19. Tidak hanya itu, data yang akurat dan transparan dibutuhkan sebagai dasar kebijakan.

“Data yang akurat dan transparan juga dibutuhkan masyarakat untuk memahami situasi pandemi dengan lebih baik. Jika pemerintah tidak melaporkan seluruh data COVID-19, termasuk angka kematian, kewaspadaan publik bisa menurun. Masyarakat akan berpikir COVID-19 sudah terkendali, padahal belum,” ungkapnya.

Hibban mendorong pemerintah memperbaiki data COVID-19 sekaligus mengingatkan publik untuk tetap waspada terhadap penyebaran COVID-19. “Selain peningkatan tes, lacak, dan isolasi, perbaikan tata kelola data ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang belum dijalankan dengan baik setelah setahun pandemi ini,” ujarnya.**

Kontak:

Said Fariz Hibban

Data Analysis Specialist LaporanCovid-19

+62 815-2744-0489

Amanda Tan

Programme Officer LaporanCovid-19

+62 858-6604-4058

LaporanCOVID-19 adalah wadah (*platform*) sesama warga untuk berbagi informasi mengenai angka kejadian terkait COVID-19 di sekitar kita. Pendekatan bottom-up melalui citizen reporting atau crowdsourcing agar setiap warga bisa ikut menyampaikan informasi seputar kasus terkait COVID-19.